



PEMDA KTT PEROLEH DANA INSENTIF DARI PEMERINTAH PUSAT

BACA HALAMAN 2



STAF KHUSUS WAPRES
KUNJUNGI TARAKAN, BAHAS
PERSOALAN KERUKUNAN

BACA HALAMAN 10



Wakil Bupati KTT, Hendrik saat menerima pemberian dana insentif pemerintahan pusat.

Pemda KTT Peroleh Dana Insentif dari Pemerintah Pusat

TANA TIDUNG - Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT), Hendrik menghadiri undangan rapat koordinasi Nasional, dan penyerahan insentif fiskal kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan itu, berlangsung di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, baru-baru ini.

Kepada wartawan, Hendrik menjelaskan acara tersebut dihadirkan langsung oleh orang nomor dua di Republik Indonesia, yaitu wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didampingi oleh Menko PMK, Menko Perekonomian, Menkeu serta PLT Kepala BPS RI.

Pada kesempatan itu, lanjut Hendrik wakil presiden RI memberikan

penghargaan berupa insentif fiskal kepada pemerintah daerah. "Kategori yang berkinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah," ungkapnya.

Dia melanjutkan, dari penghargaan itu diharapkan dapat mendorong kinerja pelaksanaan layanan pemerintahan daerah, menjadi lebih maksimal. "Utamanya dalam memperluas jangkauan program di daerah, bagi kelompok keluarga miskin," tukasnya.

Saat menyerahkan insentif fiskal, lanjutnya Wakil Presiden menyampaikan atensi bagi pemda yang mendapatkan penghargaan supaya dapat memanfaatkan bertujuan untuk meneruskan transformasi pro-

gram menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Target Nasional bisa menurunkan angka kemiskinan hingga nol persen atau zero," imbuhnya.

Kemudian Wapres RI, menekankan terhadap pentingnya target penerima program kemiskinan ekstrem, dengan menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). "Itu dilakukan supaya penyaluran bisa tepat sasaran. Terutama, kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, serta penduduk lansia termasuk penyandang disabilitas," pungkasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Pupuk Kesadaran Jiwa Patriotisme

TANJUNG SELOR - Setiap tanggal 10 November tiap tahun, merupakan hari pahlawan. Masyarakat Indonesia merayakan kegiatan sebagai bentuk penghormatan terhadap para pejuang yang telah mempertahankan kemerdekaan bangsa.

Sama halnya, pemerintah Kabupaten Bulungan merayakan hari pahlawan dikemas dalam satu rangkaian dengan peringatan hari kesehatan Nasional, yang jatuh pada 12 November tiap tahun.

Upacara berlangsung di halaman kantor Bupati Bulungan, Jalan Jelarai Kecamatan Tanjung Selor, Bulungan, Senin (13/11/2023).

Bertindakselaku pembina upacara, Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan peringatan hari pahlawan dan hari kesehatan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang sifatnya krusial.

“Selain mempupuk kesadaran terhadap jiwa patriotisme, juga kesadaran akan pentingnya kesehatan bagi masyarakat,” ungkap Syarwani.

Diselenggarakan upacara, Syarwani berkesempatan memberikan sejumlah paket bantuan bagi masyarakat korban terdampak bencana kebakaran. Selain itu, pemberian sejumlah alat bantu kesehatan bagi warga penyandang disabilitas.

Tidak hanya itu, orang nomor satu di Bulungan ini juga memberikan penghargaan terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) berprestasi. Itu dilakukan sebagai bentuk motivasi untuk terus bersemangat menjalankan tugas dan pengabdian terhadap tanggung jawab yang telah diamanahkan.

“Iya, termasuk kita berikan sejumlah paket bantuan corporate social responsibility (CSR) dari Bank BPR Kepada DPUPR Bulungan,” tuturnya.

Kemudian, penghargaan yang diberikan oleh Bupati Bulungan terhadap 10 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) tenaga kesehatan yang telah berdedikasi dan layak untuk diberikan penghargaan atau reward oleh pemerintah daerah. Diharapkan, penghargaan itu dapat dijadikan sebagai motivasi sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi kedepannya bagi masyarakat. (adv/tin/and)



Bupati Bulungan, Syarwani saat memberikan penghargaan terhadap ASN berprestasi.





Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai

Sejak 2003 Silam, Berau Tidak Setuju Gabung ke Kaltara

TANJUNG REDEB - Ajakan Berau untuk bergabung ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ditolak masyarakat. Termasuk Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai. Dia mengungkapkan, penggabungan Berau-Kaltara sulit dilakukan secara teknis. Meski, pada tahun 2003 silam Berau sebagai salah satu daerah yang diminta untuk memberikan pernyataan sikap terkait berdirinya Kaltara.

“Seingat saya, itu ada lima kabupaten. Yakni Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tarakan. Tetapi hanya Berau yang tidak menyepakati,” ungkapnya.

Tidak sepakatnya Berau, berujung kepada tidak ikut bergabung dengan Kaltara atau tetap berada di Kaltim.

Alasan tidak ingin bergabungnya Berau pada Provinsi Kaltara pada saat itu, dijelaskan Rifai, berdasarkan pertimbangan terkait sisi demografi, kemampuan anggaran serta keberadaan suku heterogen yang dimiliki Berau.

“Untuk mendirikan Provinsi Kaltara saat itu memerlukan waktu yang sangat panjang, tidak mudah melakukan penggabungan. Rencana pendirian Provinsi Kaltara sebelumnya telah dilakukan sejak 2003. Sama seperti saat ini, ketika Berau kembali

diminta bergabung, kalau pun Berau mau bergabung tidak semudah itu mengubah undang-undang yang telah ada,” jelasnya.

Rifai meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu-isu yang berkaitan dengan penggabungan Berau-Kaltara, karena ditegaskannya bahwa Berau tidak akan semudah itu untuk berpindah dari sisi Kaltim.

“Selama 20 tahun ajakan ini terus kita terima, tapi tidak pernah terealisasi. Karena memang tak segampang itu, baik secara teknis maupun secara non teknis yang diputuskan masyarakat Berau,” pungkasnya. (adv/and)



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

Dorong RSUD Abdul Rivai Terapkan Pembayaran Digital

TANJUNG REDEB - Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mendorong Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai menerapkan pembayaran berbasis digital.

Dia menilai, metode yang memanfaatkan kecanggihan teknologi tersebut bertujuan agar adanya transparansi pemasukan dari rumah sakit tersebut. "Artinya itu sebuah langkah yang maju. Pembayaran digital harus ditingkatkan agar ada transparansi," ungkapnya kepada awak media ini.

Dirinya menyebut, dengan transparansi yang jelas, tentu akan berdampak pada pemasukan rumah sakit itu sendiri. "Jadi bukan pegawainya saja yang sudah digital, tetapi transaksinya juga harus digital," terangnya.

Politikus Gerindra itu berharap, di tengah era digitalisasi ini, rumah sakit plat merah tersebut bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. "Pembayaran secara digital ini kita dorong supaya masyarakat yang ingin berobat bisa lebih mudah," tandasnya. (adv/and)

Lelang Kekosongan Jabatan Kepala Dinas Harus Segera Dilakukan



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo

TANJUNG REDEB - Saat ini, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kekosongan jabatan Kepala Dinas. Hal itu disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

Dia membeberkan, OPD yang kekosongan Kepala Dinas yakni Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Saya harap BKPSDM bisa segera melakukan lelang untuk posisi jabatan tersebut, sehingga kekosongan tidak terjadi terlanjur lama," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, dalam proses pengisian jabatan, yang terpeting adalah profesionalisme terhadap calon-calon pengisi jabatan fungsional. "Kenapa harus profesionalisme? Agar dalam menjalankan tugasnya dapat lebih maksimal. Saya harap proses lelangnya bisa lebih cepat," tegasnya.

Kendati demikian, pengisian jabatan dengan orang yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan instansi terkait. Sehingga, latar belakang pendidikan serta pengalaman karir yang dimiliki harus benar-benar sesuai dengan posisi jabatan tersebut.

"Misalnya posisi Kepala Dinas Kesehatan, kami berharap nantinya benar-benar diisi oleh orang yang tepat dan sesuai, sehingga program kerja kesehatan bisa langsung diterima dan berjalan dengan baik dan maksimal," pungkasnya. (adv/and)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

Harap Penyelesaian Gedung Baru Disbudpar Dipercepat

TANJUNG REDEB - Pembangunan gedung baru Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terus berprogres. Akan tetapi, penyelesaiannya diharapkan Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman dipercepat.

Dia menjelaskan, alasan dirinya mendorong penyelesaian pembangunan gedung baru Disbudpar tersebut berdasarkan arahan KPK. "Arahannya itu untuk menyelesaikan seluruh progres pembangunan yang masih berjalan. Maka dari itu, kami terus dorong untuk segera diselesaikan," ungkapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, harus ada keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam mengawasi kegiatan proyek pembangunan. "Yang penting jangan sampai mangkrak. Paling tidak, ada progres yang terus berjalan," katanya.

Sakirman membeberkan, untuk penyelesaian pembangunan gedung tersebut telah dianggarkan pada tahun 2024 mendatang. Untuk itu, pihaknya terus mendorong progresnya hingga rampung dikerjakan. "Gedung pariwisata sekarang sudah berjalan dan tahun depan mudah-mudahan bisa selesai gedung pariwisata kita itu," pungkasnya. (adv/and)

Angkat Bicara Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

TANJUNG REDEB - Wacana perpanjangan masa jabatan Kepala Desa atau Kepala Kampung menjadi sembilan tahun, berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditanggapi Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Mengenai hal tersebut, dia mengaku menyerahkan ke masyarakat, karena yang merasakan itu adalah masyarakat sendiri. Apalagi banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat terkait soal ini. "Keputusan tetap ada di masyarakat kan, apakah mereka mau atau tidak," katanya.

Dikatanya, usulan terkait masa jabatan kades menjadi sembilan tahun perlu didasarkan alasan yang kuat dan kini, masa jabatan kades adalah enam tahun.

Usulan itu perlu landasan alasan serta argumen kuat bahwa waktu efektif untuk membangun desa. Jika motivasi sebagai seorang kepala desa ialah mengurus kepentingan rakyat, maka enam tahun merupakan waktu yang cukup untuk membangun desa.

"Jadi memperpanjang masa jabatan hingga sembilan tahun tidak perlu dilakukan, karena kepala daerah dengan masa jabatan lima tahun juga bisa menghasilkan kerja nyata," katanya.

Menurut Politikus NasDem ini, perlu kajian kuat, jika memang pemerintah pusat ingin memperpanjang masa jabatan kepala desa atau kampung. "Kajian perlu, begitu juga Pemkab Berau, perlu duduk bersama guna membahas soal ini," pungkasnya. (adv/and)



ILUSTRASI

Anggaran Pilkada 2024 di Tarakan Sentuh Rp 24 Miliar

TARAKAN - Total anggaran Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Tarakan mencapai Rp 24 miliar. Hal itu disampaikan Wali Kota Tarakan, Khairul kepada awak media, baru-baru ini.

"Termasuk Bawaslu, keamanan, badan Ad-hoc, anggaran Pilkada sekitar Rp 24 miliar," ucap Khairul.

Khairul mengungkapkan, untuk anggaran kepada KPU, Pemkot Tarakan akan menggelontorkan anggaran Rp 15,5 miliar. Sedangkan, Pemprov Kaltara menyiapkan anggaran Rp 3,2 miliar.

"Tapi itu informasi awalnya kita terima. Dan informasinya sudah pasti Rp 3,2 miliar. Berarti kita suplai 15,5 miliar," terang Khairul.

Jumlah tersebut belum termasuk anggaran untuk Bawaslu Tarakan dan pengamanan Pilkada. Sehingga jika digabung maka akan menelan

anggaran sekitar Rp 24 miliar.

Dilanjutkannya, untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) baik KPU atau Bawaslu direncanakan akan dilakukan Pemkot Tarakan, pada Selasa (14/11/2023) besok.

Sebelumnya, penandatanganan sempat tertunda lantaran Pemkot Tarakan bersama KPU masih menunggu kepastian jumlah sharing budget atas anggaran yang akan digelontorkan Provinsi Kaltara.

Sementara itu, pada Kamis (9/11/2023) NPHD pendanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2024 telah ditandatangani bersama oleh Pemprov, KPU dan Bawaslu Kaltara. Untuk KPU Kaltara mendapat sebesar Rp 128 miliar, sementara Bawaslu

sebesar Rp 23,7 miliar.

"Kalau sudah ada nilainya berarti tidak lama lagi kita akan tanda tangan juga. Nanti saya tanya. Secepatnya dilakukan kalau bisa jumpa pagi hari Selasa ini," kata Khairul.

Khairul menyebut anggaran Pilkada sudah dipersiapkan Pemkot Tarakan. Namun karena pelaksanaan Pilkada dijadwalkan berlangsung November 2024, maka anggaran belum bisa dicairkan secara penuh.

"Kalau 40 persen dicairkan itu bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi seperti menyampaikan Presiden. Yang jelas tahun depan kita gelontorkan semua," tandasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



ADE/MKR

Kabid Sarpras Pelayaran Dishub Kota Tarakan, Sukarman.

Dishub Tarakan Ungkap Alasan Enggan Gunakan PJUTS

TARAKAN - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tarakan mengungkap alasan enggan menggunakan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS). PJUTS sendiri merupakan lampu penerangan jalan yang menggunakan cahaya matahari sebagai sumber energi listriknya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran Dinas Perhubungan Kota Tarakan, Sukarman mengatakan jika PJUTS sering dicuri sehingga pihaknya enggan menggunakannya.

"Musuh utamanya manusia itu sendiri (PJUTS), karena banyak dicuri panel-panelnya," ujar Sukarman saat ditemui di Kantor Dishub Tarakan.

Sukarman tak menampik jika PJUTS memiliki keunggulan karena

dapat mengurangi pembayaran listrik sehingga mengurangi pembiayaan. Kendati demikian, Dishub telah memasang PJUTS di sejumlah titik di Kota Tarakan. Salah satunya terpasang di pusat Kota Tarakan, hanya saja beberapa PJUTS dicuri. Bahkan pelakunya sempat tertangkap oleh pihak kepolisian.

Dari hasil survei yang dilakukan pihaknya, kurang lebih 100 titik PJUTS yang telah dipasang, kurang lebih 10 persennya hilang. "Bahkan sampai tiangnya dicuri," lanjutnya.

Selain karena sering dicuri, alasan lainnya adalah harga per unit PJUTS sangatlah mahal. Bahkan, bisa mencapai 3 kali lipat dari harga PJU listrik. Oleh karena itu, pihaknya ragu untuk memasang PJUTS di seluruh titik Kota Tarakan.

"Jadi kalau itu 3 jutaan (PJU listrik), dia sampai 10 juta satu unitnya (PJUTS)," paparnya.

Alasan selanjutnya adalah Tarakan merupakan wilayah yang memiliki cuaca hujan sepanjang tahun sehingga tpenyimpanan daya PJUTS dari matahari tidak akan banyak. "Itu yang kadang kita khawatirkan, tidak bisa menyala kalau cadangannya (tenaga surya yang terserap) tidak bagus," ungkapny.

"Itu aja kendalanya manusia dan cuaca apalagi Tarakan tidak tentu musim hujannya," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



ADE/MKR

Wali Kota Tarakan, Khairul.

Optimistis Hapus Kemiskinan Ekstrem

TARAKAN - Wali Kota Tarakan, Khairul berharap dapat menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen atau zero kasus. Penanggulangan kemiskinan ekstrem ini memang menjadi salah satu atensi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.

Dia menuturkan, dari tahun ke tahun angka kemiskinan semakin sedikit. Sehingga, diharapkan bisa zero kasus, meski kemungkinan mustahil karena Tarakan merupakan daerah terbuka.

"Masyarakat di sini hidup di atas garis kemiskinan, tapi ada saja pendatang yang datang ke sini dan berada di bawah garis kemiskinan," ucap Khairul, kepada awak media, Senin (13/11/2023).

Untuk diketahui, kemiskinan ekstrem merupakan kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap

pendapatan serta layanan sosial.

Khairul mengungkapkan, angka kemiskinan di Tarakan masih jauh di bawah rata-rata nasional, yakni sekitar 6 persen. Sementara, untuk kemiskinan ekstrem di Tarakan sudah berada di bawah 1 persen.

Khairul, tak menampik jika penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi salah satu atensi Pemkot Tarakan. Untuk itu, pihaknya terus berupaya melakukan upaya guna menurunkan kemiskinan.

"Pemberantasan kemiskinan menjadi atensi dan persoalan yang harus dituntaskan. Masih banyak warga kita hidup di bawah garis kemiskinan," ujarnya

Orang nomor satu di Bumi Panguntaka itu menilai, dalam upaya menurunkan angka kemiskinan diperlukan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pemkot Tarakan, kata Khairul, telah menyiapkan berbagai upaya guna menurunkan angka ke-

miskinan. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan.

Menurutnya, lapangan pekerjaan sangat berperan besar dalam menurunkan angka kemiskinan. Sehingga yang perlu dilakukan saat ini adalah menarik banyak investor di Tarakan sehingga lapangan pekerjaan terbuka luas.

"Karena jika hal itu tidak dilakukan maka pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan tidak akan terbuka," katanya.

"Rumusnya begitu. Mengurangi kemiskinan, ciptakan lapangan pekerjaan sehingga banyak orang memiliki pekerjaan. Alhasil hidup di atas garis kemiskinan. Namun jika seseorang mungkin secara fisik tidak mampu bekerja seperti orang tua maka pemerintah hadir memberi perlindungan," tutup Khairul. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya

Editor: Andhika



ADE/MKR

Foto bersama Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bersama Wali Kota Tarakan beserta jajaran.

Staf Khusus Wapres Kunjungi Tarakan, Bahas Persoalan Kerukunan

TARAKAN - Rombongan Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kota Tarakan, Senin (13/11/2023). Dalam kunjungan tersebut, Staf Khusus Wapres RI Bidang Kerukunan dan Perdamaian, Masykuri Abdillah bersama Wali Kota Tarakan, Khairul membahas kerukunan dalam bermasyarakat.

Masykuri Abdillah menjelaskan ada beberapa alasan mengapa pihaknya mengunjungi Tarakan. Pertama, Tarakan dihuni masyarakat yang majemuk. "Bahkan informasinya penduduk asli hanya sekitar 5 persen. Biasanya dalam masyarakat majemuk ada perbedaan. Dan perbedaan itu bisa menimbulkan perselisihan baik kelompok suku, agama atau politik," ucapnya saat diwawancarai

usai pertemuan, Senin (13/11/2023).

Kemudian Tarakan memiliki sejarah konflik sosial yang terjadi pada 2010 lalu. Menariknya, konflik dapat diselesaikan dengan cepat dan hingga saat masih kondisi sudah kondusif dan tidak ada konflik. Masykuri menyebut Wapres RI, Ma'aruf Amin selalu mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga kerukunan. Terlebih, menjelang tahun politik sehingga rentan terjadi konflik.

"Sayakira menjelang tahun politik, kita semua harus tetap jaga kondusifitas. Saya rasa pak wali juga punya pengalaman bagaimana menggerakkan tokoh agama atau suku-suku untuk menjaga kondusifitas," ujarnya.

Sementara Wali Kota Tarakan, Khairul mengatakan, komunikasi menjadi hal yang sangat penting

dalam menjaga kerukunan di masyarakat. Termasuk komunikasi kepada tokoh-tokoh agama, suku, dan masyarakat. "Kalau selama ada komunikasi pasti tidak ada masalah. Dan itu yang kami terapkan. Ini yang saya lakukan selama hampir 5 tahun menjabat," katanya.

Khairul pun mengingatkan agar masyarakat selalu menjaga kondusifitas terlebih memasuki tahun-tahun politik. Menurutnya, berbeda pandangan politik merupakan hal yang wajar, yang terpenting tetap menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

"Jangan selalu mencari perbedaan. Carilah persamaan di dalam perbedaan," pungkasnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



Lebih Dekat dengan Satu Klik



TERVERIFIKASI
DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033



M. UDIN DORONG PJ GUBERNUR TUNTASKAN KASUS 21 IUP PALSU

BACA HALAMAN 2-3



JUAL SEPEDA
MOTOR CURIAN
DI FB, PEMUDA
TANGKAP POLISI
BACA HALAMAN 35

M. Udin Dorong Pj Gubernur Tuntaskan Kasus 21 IUP Palsu

SAMARINDA - Kasus 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang merugikan negara dan masyarakat di Kalimantan Timur masih menemui jalan buntu. Anggota DPRD Kaltim M. Udin mendorong Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik ambil bagian dalam upaya penyelesaian.

Menurut Politisi Golkar ini, Pj Gubernur Kaltim dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada Polda Kaltim. Menurutnya, kasus ini sudah berlarut-larut dan harus segera dituntaskan.

"Kasus 21 IUP palsu ini sudah berlangsung sejak tahun 2021, dan sampai sekarang belum ada tindakan yang konkret dari pemerintah. Padahal, banyak aktivitas penambangan batu bara ilegal yang merusak lingkungan dan mengganggu ekonomi masyarakat," kata M. Udin.

M. Udin mengatakan, banyak daerah di Kalimantan Timur yang menjadi korban dari tambang ilegal, khususnya di Kutai Kartanegara. Ia mencontohkan, jalan Kota Bangun ke Tenggarong Kutai Kartanegara sangat rusak karena dilewati lebih dari 200 truk pengangkut batu bara ilegal setiap hari.

Aktivitas ilegal ini membuat jalan akses masyarakat rusak parah. Selain itu, tambang ilegal juga masuk ke daerah-daerah yang seharusnya dilindungi, seperti hutan dan kawasan konservasi.

"Ini sangat merugikan negara dan masyarakat, mereka memakai infrastruktur jalan umum, baik provinsi, APBN, maupun kota dan kabupaten



M. Udin saat melakukan sidak, ke salah satu perusahaan pertambangan.

sebagai jalur angkut, sehingga merugikan masyarakat," tegas Legislator yang pernah menjadi Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan.

Ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang belum ada tindakan yang tegas terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam tambang ilegal. Dirinya mengungkapkan, ada camat di Kutai Kartanegara yang berani menolak tambang ilegal, tapi malah diancam. Akibatnya, banyak kelurahan atau desa yang takut melapor.

"Pj Gubernur Kaltim harus bersikap

tegas dan transparan dalam menangani kasus IUP palsu. Ia harus memberikan data lengkap kepada Polda Kaltim, agar mereka bisa menelusuri dan menindak oknum-oknum yang memalsukan IUP dan melakukan tambang ilegal," pungkasnya. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Nidya Listiyono Sebut Kaltim Harus Lepas dari Jerat Tambang dan Bangun Ekonomi Rakyat

SAMARINDA - Kalimantan Timur (Kaltim) adalah provinsi yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, namun juga dikutuk oleh nasib yang ironis. Sebagai provinsi yang menghasilkan sebagian besar batu bara nasional, Kaltim seharusnya menjadi provinsi yang makmur dan sejahtera. Namun, kenyataannya, Kaltim justru menjadi provinsi yang penuh dengan masalah, mulai dari kerusakan lingkungan, kemiskinan, ketimpangan, hingga korupsi.

Salah satu akar masalah yang melanda Kaltim adalah ketergantungan yang berlebihan pada sektor pertambangan, khususnya batu bara. Sektor ini memang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah, namun juga menimbulkan dampak negatif yang tidak kalah besarnya.

"Kaltim memiliki potensi alam, sayangnya, selama ini hanya sektor ekstraktif yang menjadi tulang punggung,

setelah sebelumnya kayu. Padahal sektor ini juga memiliki masa kadaluarsa, sehingga Kaltim harus siap menghadapi perubahan," jelas Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono.

Ia mengungkapkan, sudah saatnya Kaltim melepaskan diri dari jerat tambang dan membangun ekonomi rakyat yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Ekonomi rakyat akan merujuk pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pariwisata, yang mampu memberdayakan masyarakat dan melestarikan lingkungan.

"UMKM bisa membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kaltim, seperti hasil laut, pertanian, perkebunan, dan kerajinan," urainya,

Hanya saja, untuk mengembangkan UMKM dan pariwisata di Kaltim,

dibutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pemerintah harus memberikan dukungan berupa kebijakan, regulasi, fasilitasi, dan insentif yang memihak kepada UMKM dan pariwisata.

Swasta harus memberikan bantuan berupa modal, teknologi, pemasaran, dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM dan pariwisata. Masyarakat harus memberikan partisipasi berupa inisiatif, keterlibatan, dan pengawasan yang aktif dalam pengembangan UMKM dan pariwisata.

"Saya yakin Kaltim juga bisa, asalkan ada komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat," pungkasnya. ([eky/adv/dprdkaltim](#))

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



**PESERTA JFAK 2023
DIHARAP MILIKI KOMPETENSI
& KETERAMPILAN**



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim Dra. Nina Dewi MAP, saat memberikan sambutan sekaligus menutup acara pelatihan JFAK Tingkat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Kaltim

PESERTA JFAK 2023 DIHARAP MILIKI KOMPETENSI DAN KETERAMPILAN YANG DIBUTUHKAN

SAMARINDA – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim, Nina Dewi berharap para peserta yang telah mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) 2023 Tingkat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Kaltim memiliki kompetensi, keterampilan serta karakteristik pengetahuan yang diperlukan dalam tugas jabatannya.

Hal ini disampaikan oleh Nina Dewi saat memberikan sambutan sekaligus menutup acara pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) tahun 2023 yang digelar oleh (BPSDM) Provinsi Kaltim, pada Jumat (11/11/2023) di Hotel Fugo Jalan Untung Surapati, Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

“Saya berharap para peserta yang telah mengikuti pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) 2023 memiliki

kompetensi, keterampilan, serta karakteristik pengetahuan yang diperlukan dalam tugas jabatannya,” ujar Nina Dewi.

Nina Dewi juga menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kaltim sangat mendukung program pelatihan seperti JFAK BPSDM Kaltim dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di daerah. Ia berharap program-program pelatihan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh aparatur pemerintah di Kaltim.

“Saya sangat mengapresiasi partisipasi dan semangat seluruh peserta dalam mengikuti pelatihan JFAK BPSDM Kaltim. Harapan kami ke depannya agar pelatihan JFAK BPSDM Kaltim dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dan inovatif di daerah masing-masing” tutupnya. **(ADV/BPSDMkaltim/Han)**



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP

PENUHI KEWAJIBAN JAM PELAJARAN, ASN DIIMBAU IKUT PELATIHAN ONLINE BPSDM KALTIM

SAMARINDA - Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP mengatakan akan terus berkomitmen dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM).

Selain dengan cara mengadakan pelatihan klasikal atau tatap muka, pihak BPSDM Kaltim juga memiliki kegiatan secara online yang bisa diikuti oleh Aparat Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum seluruh Indonesia.

"Selain pelatihan bersifat klasikal, kita juga ada kegiatan pelatihan non klasikal atau secara daring (online read)," ujarnya.

Diketahui, saat ini ada dua kegiatan yang biasanya dilakukan oleh BPSDM Kaltim secara online, yakni Sharing Session dan Webinar yang baru saja selesai dilaksanakan beberapa hari yang lalu.

Nina Dewi menghimbau kepada para ASN harus memanfaatkan kegiatan pelatihan se-

cara online tersebut untuk memenuhi kewajiban Jam pelajaran (JP) dalam mengembangkan kompetensi dan memperluas kapasitas keilmuan para ASN.

"Jadi ASN diharapkan untuk kunjungi website dan Instagram BPSDM Kaltim, karena di sana biasanya ada pengumuman mengenai kegiatan pelatihan online BPSDM. Tahun depan pelatihan untuk pengembangan kompetensi itu wajib untuk CPNS wajib belajar 20 JP dan PPPK 25 JP. Jadi lumayan buat memenuhi kewajiban jam pelatihan ASN, jadi manfaatkan lah pelatihan yang kita selenggarakan," jelasnya.

Dengan adanya pengembangan kompetensi secara online ini juga sangat membantu bagi ASN yang jauh dari ibu kota Kaltim, Samarinda karena bisa mengikuti pelatihan dari rumah. **(ADV/Han/BPSDMkaltim)**

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra Nina Dewi MAP

Tahun Depan, Orientasi PPPK BPSDM Kaltim di Tambah 1 Hari

SAMARINDA – Penyelenggaraan masa orientasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengembangkan diri dan menambah kapasitas keilmuan. Pelaksanaan orientasi ini wajib digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam hal menyediakan tempat dan tenaga pengajar yang handal dalam memberikan pembekalan keilmuan bagi PPPK selama 3 hari.

Dan tahun 2024, rencananya jumlah hari orientasi akan ditambah 1 hari menjadi menjadi 4 hari. Hal ini dikatakan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dra. Nina Dewi MAP saat ditemui oleh mediakaltim.com beberapa wak-

tu yang lalu. “Orientasi PPPK rencananya kita akan tambah 1 hari untuk tahun depan menjadi 4 hari,” ungkapnya.

Ditambahnya jumlah hari orientasi ini, dikatakan Nina Dewi untuk memenuhi kewajiban Jam Pelajaran (JP) pada PPPK pertahun 24 JP. “Jadi lumayan untuk menambah JP PPPK, buat mencapai target 24 JP pertahun,” jelasnya.

Dengan ditambahnya hari orientasi, artinya pihak BPSDM Kaltim juga harus mempersiapkan materi tambahan untuk diajarkan pada hari terakhir Orientasi PPPK.

“Kita akan berikan materi bela negara untuk di hari ke 4, tapi kami juga membolehkan untuk pihak kabupaten kota jika ingin menambahkan materi berkaitan kedaerahan atau apapun sesuai kebutuhan,” pungkasnya. **(ADV/han/BPSDMkaltim)**



Kepala BPSDM Kaltim, Dra Nina Dewi MAP saat melakukan penandatanganan PKS PKS bersama Pemerintah Kabupaten Berau yang diwakili oleh BKPSDM Berau.

BPSDM KALTIM DAN BKPSDM BERAU BEKERJA SAMA KEMBANGKAN SDM DI BERAU

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Berau menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Berau.

Penandatanganan PKS ini dilakukan usai pembukaan evaluasi paska pelatihan dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 yang digelar di Ballroom Hotel Exclusive di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada Selasa (7/11/2023) lalu.

“Saya Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Berau atas segala bentuk dukungan sehingga acara ini dapat terselenggara sesuai dengan harapan” jelas Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP.

Penandatanganan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen bersama antara BPSDM provinsi Kaltim dan BKPSDM kabupaten Berau dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada di kabupaten Berau. **(ADV/Han/BPSDMkaltim)**



ASN DIMINTA MANFAATKAN PROGRAM KALTIM CORPU SEBAGAI SARANA BELAJAR MANDIRI

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada acara Jambore Inovasi Kalimantan (JIK) Agustus 2023 lalu telah meluncurkan Kalimantan Timur Corporate University (Kaltim CorpU) yang merupakan sarana untuk belajar mandiri yang dimiliki oleh Pemprov Kaltim.

Untuk menyukseskan Kaltim CorpU ini, pihak BPSDM Kaltim juga telah membuat portal digital Knowledge Integrated Solution System (KISS) yang bisa diakses melalui alamat website BPSDM Kaltim. Dalam portal digital KISS tersebut, Aparat Sipil Negara (ASN) bisa memanfaatkan sebagai sarana pelatihan mandiri yang bisa mengembangkan kemampuan dan kapasitas keilmuan ASN.

Oleh sebab itu Kepala BPSDM Kaltim Dra Nina Dewi MAP, mengimbau kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk bisa memanfaatkan pro-

gram Kaltim CorpU tersebut. “Jadi metode pelatihan bisa melalui coaching mentoring langsung diruang kerja,” ujarnya.

Dengan Kaltim CorpU dan KISS ini ASN bisa memenuhi kewajiban belajar 20 jam bagi PNS dan 24 jam bagi PPPK untuk pengembangan kompetensi ASN, sesuai peraturan pemerintah.

“Belajar mandiri ini bisa juga untuk memenuhi jam pelajaran ASN yang ada di perangkat daerah, agar bisa memenuhi syarat minimal dan maksimal jam pelajaran ASN. Jadi nggak harus membuat anggaran besar untuk pelatihan demi mengejar jam pelajaran,” pungkasnya.

Dalam waktu dekat, pihak BPSDM Kaltim akan mensosialisasikan program ini agar bisa dijalankan oleh OPD yang ada di provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltim. “Insya Allah program ini nanti kita akan turlarkan ke kabupaten dan kota,” tutupnya. **(Han/ADV/BPSDMkaltim)**



Sesi foto bersama Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Nina Dewi, M.A.P, Kepala bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, M.M , para jajaran staf BPSDM Kaltim dan para peserta.

BPSDM KALTIM TUTUP PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN 18 KUKAR 2023

SAMARINDA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 18 lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2023. Acara ini digelar di Aula Utama BPSDM Kaltim jalan HM Rifadin Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

Pelatihan PKP yang berlangsung dari tanggal 24 Juli – 11 November 2023 ini diikuti oleh 39 peserta dari berbagai perangkat daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam pelatihan ini, peserta diberikan materi tentang

kepemimpinan Pancasila dan bela negara, kepemimpinan pelayanan, pengendalian pekerjaan, dan aktualisasi kepemimpinan. Pelatihan ini dilaksanakan selama 104 hari kalender, dengan 86 hari non-klasikal dan 18 hari klasikal yang dilaksanakan secara blended learning.

Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, Dra. Nina Dewi, M.A.P memberikan sambutan pada acara penutupan pelatihan dan menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan pelatihan ini. Ia juga berharap pelatihan ini dapat memberi-

kan manfaat bagi para peserta dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pengawas di lingkungan pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, panitia penyelenggara berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi para peserta dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pengawas di lingkungan pemerintahan.

"Kami berharap pelatihan ini memberikan manfaat bagi para peserta dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan pengawas," pungkas Kepala bidang PKMF BPSDM Kaltim Rina Kusharyanti, S.STP, M.M. **(ADV/BPSDMkaltim/Han)**



Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Dra. Nina Dewi, M.AP, saat menyampaikan sambutan pada penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 18 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023, di aula utama kantor BPSDM Kaltim.

ASN HARUS MAMPU KEMBANGKAN INOVASI SETELAH PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAJAW

SAMARINDA – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Dra. Nina Dewi, M.AP, baru-baru ini memberikan sambutan pada acara penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 18 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kelas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023.

Acara tersebut berlangsung di aula utama kantor BPSDM Kaltim di Jalan HAM Rifadin Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

Dalam sambutannya, Dra. Nina Dewi mengucapkan terima kasih kepada para peserta PKP yang telah menyelesaikan pelatihan dan

memberikan inovasi terbaik yang dituangkan dan diimplementasikan dalam laporan Aksi Perubahan. Ia berharap inovasi yang telah diberikan oleh para peserta dapat berkesinambungan dan memberikan dampak yang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Dra. Nina Dewi juga menekankan bahwa inovasi-inovasi yang diberikan oleh para peserta pelatihan tidak hanya sebagai pemenuhan syarat dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan, tetapi juga sebagai gerbang pembuka semangat untuk memberikan pelayanan yang terbaik khususnya kepada masyarakat.

“Dalam kesempatan ini, saya berharap para peserta dapat terus mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” harapnya.

Acara penutupan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan 18 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kelas Kabupaten Kutar 2023 ini dihadiri oleh para peserta pelatihan, panitia penyelenggara, dan pihak terkait lainnya.

“Semoga pelatihan ini dapat memberikan manfaat bagi para peserta dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pengawas di lingkungan pemerintahan,” tutupnya. **(ADV/BPSDMkaltim/Han)**



Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti S.STP., MM. Saat menyampaikan laporan panitia acara.

PELATIHAN JFAK BPSDM KALTIM BERHASIL TINGKATKAN KUALITAS KEBIJAKAN PUBLIK

SAMARINDA – Pelatihan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) BPSDM Kaltim telah sukses diselenggarakan pada Jumat (11/11/2023) di Hotel Fugo Jalan Untung Suropati, Karang Asam, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda.

Acara penutupan dihadiri oleh Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi dan diawali dengan laporan dari panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti.

Pelatihan JFAK BPSDM Kaltim diikuti oleh 31 peserta dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Kaltim. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan membantu dalam pengembangan kebijakan

publik yang inovatif, adaptif, dan berbasis pada bukti.

Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta pelatihan yang telah mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh.

“Saya berharap agar semua peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh setelah kembali bekerja di tempat kerja masing-masing daerah,” pintanya.

Laporan dari panitia penyelenggara menunjukkan bahwa pelatihan JFAK BPSDM Kaltim berjalan dengan sukses dan lancar. Peserta pelatihan memberikan banyak masukan positif terkait materi dan metode yang

diberikan dalam pelatihan ini.

Kepala Bidang PKMF BPSDM Provinsi Kaltim, Rina Kusharyanti dalam laporannya menyampaikan bahwa pelatihan JFAK BPSDM Kaltim telah berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik dan membantu pengembangan kebijakan publik yang inovatif, adaptif, dan berbasis pada bukti.

Acara penutupan berakhir dengan harapan agar pelatihan JFAK BPSDM Kaltim dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dan inovatif di daerah masing-masing. “Terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam pelatihan ini,” tutupnya. **(ADV/BPSDMkaltim/Han)**



Kepala BPSDM Kaltim Dra. Nina Dewi, MAP

BPSDM KALTIM PETAKAN KEBUTUHAN ASN, TAHUN DEPAN GELAR ORIENTASI 1.400 PPPK

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) telah memetakan pelatihan-pelatihan pengembangan kompetensi untuk pegawai.

"Pada bulan Januari 2024, kami telah memetakan orientasi PPPK, dengan data yang menunjukkan ada 1.400 ASN PPPK yang akan kami jadwalkan," ungkap Kepala BPSDM Kaltim, Dra. Nina Dewi, MAP, saat ditemui oleh Mediakaltim.com beberapa hari lalu.

Nina Dewi menjelaskan, melalui AKPK sebagai salah satu metode dalam menggali kebutuhan pengembangan kompetensi untuk pegawai, bahwa perencanaan tahun 2024

seperti pelatihan manajerial, orientasi PPPK, dan pelatihan kepemimpinan tingkat 2.

"Tahun depan kami akan menyelenggarakan pelatihan tingkat 2 ini dengan tingkat lebih tinggi lagi dalam pelatihannya," ucapnya.

Perencanaan ini dilakukan agar semua penjadwalan bisa berjalan efektif di kampus Bagimu Negeri Jiwa Raga kami, yang merupakan nama lain dari kompleks pelatihan BPSDM Kaltim yang terletak di Jalan HAM Rifadin Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

"Pastinya kami sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, akan terus berkomitmen mengembangkan aparatur sipil negara di Kaltim," pungkasnya. **(ADV/BPSDMkaltim/Han)**

Informasi Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra



Umur Tanaman (Tahun)

Rp Harga TBS (Rp/Kg)

3	1.917,85
4	2.049,33
5	2.058,14
6	2.079,43
7	2.091,39
8	2.107,53
9	2.149,04
>10	2.174,53

Harga CPO

Rp. 10.532,27



Harga Kernel

Rp. 4.747,28

Update : Oktober Periode II (16-31 Oktober 2023)

@disbunkaltim disbud.kaltimprov.go.id

KALTIM BERDAULAT MENUJU INDONESIA SEJAHTERA

DINAS PERKEBUNAN *Minggu Ke 1*
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR *BULAN:*
November 2023

SIPASBUN
SISTEM INFORMASI PASAR PRODUK PERKEBUNAN UNGGULAN

KOMODITAS	PETANI/ PRODUSEN	PENGECEK/ PENGUMPUL	Indikasi Karet	
Karet	Rp.9.900 /kg K3 50-55%	Rp.12.700/Kilo	Indikasi Karet K3 100%	Rp.22.750/kg
Lada Putih	Rp.55.000 /kg	Rp.97.000 /kg	Indikasi Karet K3 85%	Rp.19.337/kg
Kelapa Tua	Rp.5.700 / hj	Rp.2.200/hj	Indikasi Karet K3 50%	Rp.9.668/kg
Kelapa Muda	Rp.8.700 / hj	Rp.9.500 / hj	TBS Kelapa Sawit Penetapan Harga Provinsi Bagi Pekebun Bermitra Periode II (16 sd 30) bulan Oktober 2023 Berdasarkan Umur Tanaman	
Biji Kakao	Rp.28.000 / kg	Rp.32.000 / kg	Harga TBS Umur >10 Thn Rp.2.174,5/kg Naik Rp.17,8 atau 0,8% dari periode sebelumnya	
Gula Merah Aren	Rp.28.800 / kg	Rp.30.200 kg		

HARGA RATA-RATA KOMODITI PERKEBUNAN KABUPATEN/KOTA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

INFORMASI HARGA INDIKASI KARET
Tanggal 10 November 2023

Informasi Harga Indikasi Karet Provinsi Kalimantan Timur Berbagai Tingkatan Kadar Karet Kering (K3)

Dasar Perhitungan Harga Indikasi Karet adalah Harga SICOM (Singapore Commodity) Hari ini pada Technically Specified Rubber (TSR20)/ Standard Indonesian Rubber (SIR20)

Harga SICOM hari ini : 147,8 US Cent
Kurs Rupiah Kisaran : RP.15.551
Harga Dasar / FOB : RP.22.984 X 85%
RP.19.536 **TURUN 0,2%**

KONDISI KARET

Harga	Harga / kg
Harga Jalan Pabrikasi K3 100%	Rp. 18.000 - Rp.19.000
HARGA KARET KERING STOK GUDANG 15 HARI LEDIH K3 70% - 76%	Rp. 13.750 - Rp. 14.750
HARGA KARET KERING STOK GUDANG K3 65% - 69%	Rp. 12.800 - Rp. 13.600
HARGA KARET KERING STOK GUDANG TINGKAT PETANI/UPPD K3 60% - 64%	Rp. 11.800 - Rp. 12.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI / UPPD K3 55% - 59%	Rp. 10.800 - Rp. 11.600
HARGA KARET KERING TINGKAT PETANI K3 50% - 54%	Rp. 9.800 - Rp. 10.600
HARGA KARET BASAH TINGKAT PETANI K3 45% - 49% PANEN 2-3 HARI	Rp. 8.800 - Rp. 9.600
HARGA KARET BASAH TINGKAT PETANI K3 40% - 44% (DARU PANEN)	Rp. 7.800 - Rp. 8.600

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud

Ketua DPRD Dorong Peran Aktif Ormas untuk Sukseskan Pilkada 2024

SAMARINDA - Pilkada 2024 akan menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan dan kemajuan. Untuk itu Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mendorong partisipasi aktif semua pihak termasuk Organisasi Masyarakat (Ormas).

Menurutnya, Ormas adalah wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam UUD 1945, yang memiliki peran yang strategis dan signifikan. Ormas juga memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik. Dengan fungsi tersebut Hamas

sapaannya, mendorong partisipasi Ormas untuk suksesi Pemilu 2024.

"Sebagai bagian dari masyarakat sipil, ormas harus menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi. Ormas harus menjadi salah satu pemantau dalam proses pilkada, agar berjalan dengan baik," terangnya, Senin (13/11/2023).

Ia mengatakan, jangan sampai ada ormas yang masih bersikap pasif dan apatis dalam menghadapi pilkada, dan lebih mementingkan kepentingan internal atau kelompoknya, daripada kepentingan umum. Atau ada ormas yang justru membuat kegaduhan, tidak menjaga kondusifitas pilkada. "Dengan partisipasi aktif ormas,

kami yakin, pilkada 2024 akan menjadi lebih demokratis, transparan, dan akuntabel," serunya.

Legislator Golkar ini pun mendorong, ormas di Kaltim turut terlibat bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, melakukan edukasi, sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat tentang pentingnya pilkada. "Supaya masyarakat betul-betul paham bahwa yang dia pilih adalah yang menentukan nasib mereka untuk 5 tahun kedepan," tutupnya. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



ANDI/MEDKAL

DPRD Kaltim saat menggelar Rapat Paripurna.

DPRD Kaltim Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Efisien untuk Cegah Silpa

SAMARINDA - DPRD Kaltim mendorong Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi rutin terhadap proses lelang, terutama pada proyek-proyek berskala besar. Musabab, pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, Senin (13/11/2023). Evaluasi terhadap proses lelang sebutnya, bertujuan untuk mencegah angka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tinggi pada akhir tahun.

Seno Aji mengatakan, dengan terus mengawal sebuah proyek dari proses lelang pengadaan barang dan jasa, dapat mengantisipasi rendahnya daya serap anggaran pada APBD Kaltim.

"Proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, agar tidak ada proyek yang terlambat atau gagal. Kami juga meminta OPD Kaltim yang capaian daya serapnya masih rendah untuk meningkatkan kinerjanya," ujar Senoz

DPRD Kaltim sebut Politisi Gerindra ini, juga telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengantisipasi Silpa pada APBD 2023. Dengan harapan serapan anggaran

dapat optimal pada tahun 2024 dan tahun tahun anggaran berikutnya.

Adapun untuk tahun anggaran 2024, ia mendorong agar Pemprov terus melakukan evaluasi mulai dari perencanaan, lelang dan tahapan selanjutnya untuk sebuah pengerjaan untuk mengurangi kemungkinan Silpa.

"Harus dirancang sebelum dimulai. Kami meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024," tutupnya. **(Eky/Adv/DprdKaltim)**

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari

radar.
MEDIA
MEDIA KALTIM GROUP

www.radaribukota.com | www.radarkutim.com
www.radarkukar.com | www.samarinda.com
www.radarberau.com | www.radar.paser.com | www.radarbalkpapan.com

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0853 4894 3982



Pelabuhan Kenyamukan Kutai Timur.

Pelabuhan Kenyamukan, Agiel: Tol Laut Baru di Kutim Permudah Distribusi Logistik

SAMARINDA - Pelabuhan Kenyamukan di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah. Pelabuhan ini juga menjadi bagian dari Tol Laut Jalur VIII yang menghubungkan Sulawesi dan Pulau Jawa dengan Kalimantan Timur.

Pelabuhan Kenyamukan dibangun sejak tahun 2012 dengan anggaran Rp120 miliar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Pembangunan menggunakan sistem Multi Years Contract (MYC). Pelabuhan ini memiliki fungsi penting bagi warga Kutim, terutama untuk mempermudah akses transportasi laut dan logistik bagi masyarakat lokal.

Menurut Agiel Suwarno, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), pelabuhan ini dapat mempermudah distribusi kebutuhan pokok dan material masyarakat setempat.

"Saya yakin jika pelabuhan tersebut beroperasi, pasti bisa mempermudah distribusi kebutuhan pokok dan material masyarakat setempat," ujar Agiel.

Ia menambahkan, pelabuhan ini

juga akan menjadi ikon baru bagi Kutim yang tentu efeknya bisa meningkatkan pendapatan daerah. "Itu (pelabuhan) juga akan menjadi ikon baru bagi Kutim yang tentu efeknya bisa meningkatkan pendapatan daerah," sebut Politikus PDI-Perjuangan ini.

Pelabuhan Kenyamukan juga mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menetapkan wilayah perairan di Pelabuhan Kenyamukan sebagai salah satu Tol Laut Jalur VIII pada tahun 2017 lalu. Apalagi letaknya sangat strategis, yakni masuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia II.

"Pelabuhan itu mulai dibangun saat saya masih anggota DPRD Kutim. Itu tentu untuk mempermudah distribusi bahan pokok yang datang dari Sulawesi dan Pulau Jawa. Aksesnya akan semakin mudah, bahkan nanti harga bisa lebih murah. Karena selama ini distribusi logistik masih berpusat di Pelabuhan Samarinda," kata Agiel.

Ia berharap pengerjaan pelabuhan tersebut dapat segera rampung sesuai target yang telah ditentukan, sehingga bisa segera beroperasi oleh

warga setempat. "Proses pengerjaannya memang lumayan lama. Saya berharap pengerjaannya bisa segera rampung dan beroperasi sesuai target," harap Legislator Dapil Bontang-Kutim-Berau ini.

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah mengatakan, awal tahun 2023 sudah dimulai pembangunan jalan pendekat sepanjang 650 meter dengan lebar 25 meter yang didukung dana CSR PT KPC Rp 20 miliar.

"Termasuk perbaikan jembatan yang rusak. Mudah-mudahan Oktober mendatang bisa selesai," sebutnya.

Pembangunan jalan pendekat ini dibagi menjadi dua seksi. Seksi I sepanjang 700 meter dikerjakan oleh BBPJN, sedangkan seksi II sepanjang 650 meter dikerjakan oleh KPC. Dengan demikian, keseluruhan jalan pendekat bisa selesai sesuai target yang diharapkan. Mengingat, seksi I memang menjadi kewenangan BBPJN. **(Eky/Adv/DPRD Kaltim)**

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin

Komisi IV Sebut Disdikbud Kaltim Perlu Evaluasi Kinerja dan Anggaran

SAMARINDA - Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan di provinsi ini. Namun, kenyataannya, daya serap anggaran Disdikbud Kaltim masih rendah dan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.

Hal ini tentu menjadi sorotan publik, terutama anggota Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan dan kebudayaan. Salah satu anggota komisi tersebut, Salehuddin, mengkritik kinerja Disdikbud Kaltim dalam mengelola anggaran. Ia menilai bahwa Disdikbud Kaltim

belum mampu mengatasi berbagai kendala yang ada, seperti masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan proses lelang dan pengelolaan program.

Salehuddin mengatakan, ia sudah berkomunikasi dengan Disdikbud Kaltim untuk meminta penjelasan tentang hal tersebut. Ia mengetahui bahwa ada beberapa kendala yang mempengaruhi daya serap anggaran, seperti masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan proses lelang dan pengelolaan program.

"SDM yang mampu mengelola program yang sudah direncanakan dan disetujui itu sangat penting untuk mencapai daya serap anggaran yang tinggi," ujarnya, Senin (13/11/2023).

Politisi Golkar ini juga berharap, Disdikbud Kaltim dapat membuat terobosan yang dapat meningkatkan kinerja dan pemanfaatan anggaran. Ia menginginkan agar Disdikbud Kaltim dapat memperbaiki daya serap anggaran pada APBD Perubahan Kaltim tahun 2023 dan APBD Tahun 2024.

"Daya serap anggaran yang rendah itu menunjukkan bahwa ada program yang tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Disdikbud Kaltim harus bisa mengatasi hal ini," tutupnya. (Eky/Adv/DPRDKaltim)

Pewarta : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



ANDI/MEDKAL

Ketua Fraksi PKB, Syafruddin

Syafruddin Ajak Pemuda Kritis dan Peduli Kepentingan Masyarakat

SAMARINDA - Pemimpin masa depan adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan, relasi atau jaringan, dan karakter. Itulah pesan yang disampaikan oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin kepada generasi muda Kaltim.

Syafruddin, yang juga Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Kaltim Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), mengajak para pemuda untuk menyiapkan diri menjadi pemimpin masa depan yang dapat berjuang untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.

Para pemuda Kaltim sebut Pria yang kerap disapa Udin ini, juga harus memperluas jaringan dan relasi dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar kampus. Selain itu, mereka harus membentuk karakter yang kuat, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas.

"Ada tiga bekal yang harus kalian perbanyak, yaitu ilmu pengetahuan, relasi atau jaringan, dan karakter. Dengan tiga bekal ini, kalian pasti akan menjadi generasi yang dapat meneruskan kepemimpinan di semua level dan semua bidang," bebarnya.

Sebagai generasi penerus bangsa, menurutnya harus memiliki semangat belajar yang tinggi dan tidak puas dengan ilmu yang sudah dimiliki. Mereka harus terus mengasah kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas.

"Jangan hanya belajar untuk lulus, tapi belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara," tuturnya.

Ia bercerita tentang pengalamannya mulai semasa mahasiswa, hingga sebagai politisi sekaligus penggiat pendidikan. Menurutnya ia memiliki visi misi untuk mengadvokasi dan memberikan keberpihakan kepada masyarakat.

Namun, kenyataannya, saat ini banyak pemuda khususnya dari kalangan mahasiswa yang masih kurang aktif dan kritis dalam mengikuti perkembangan zaman. Udin menilai, mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti bermain game online, menonton drama Korea, atau berselancar di media sosial.

Generasi muda juga cenderung apatis dan tidak peduli dengan isu-isu

sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di sekitar mereka. Generasi ini lebih memilih diam dan mengikuti arus, daripada berani menyuarakan aspirasi dan pendapatnya.

Padahal, sebagai calon pemimpin masa depan, para mahasiswa harus memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. "Harus berani mengambil sikap dan tindakan yang sesuai dengan hati nurani dan nilai-nilai kebenaran. Mereka harus menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara," serunya.

Sebagai informasi tambahan, DPRD Kaltim telah beberapa kali mengadakan kuliah umum, praktek lapangan, atau hanya sekadar diskusi dengan mahasiswa dari berbagai kampus di Bumi Etam. Hal ini merupakan upaya "Karang Paci" untuk memberikan pendidikan politik, karakter dan keilmuan lainnya dalam rangka menciptakan generasi Kaltim yang berkualitas. (eky/adv/dprdkaltim)

Pewartu : Andi Desky
Editor : Nicha Ratnasari



DWI

Amir Tosina, Ketua Komisi III DPRD Bontang.

Sidak Proyek Pembangunan Terminal, Amir Khawatir Target Pengerjaan Meleset

BONTANG - Komisi III DPRD Bontang beserta para rombongan melakukan kunjungan ke lapangan atau inspeksi mendadak (sidak) pengerjaan proyek Pembangunan Terminal yang terletak di Jalan Letjen S Parman, Bontang Barat, Senin (13/11/2023).

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, mengatakan pengerjaan pembangunan terminal ternyata sampai saat ini belum juga rampung. Menurutnya, hal ini sangat mengkhawatirkan, apalagi jika sampai di Desember mendatang.

"Banyak sekali pertanyaan dari

masyarakat yang masuk terkait pembangunan terminal. Dan saya menjawabnya, kami akan melakukan sidak nantinya," ucapnya saat memimpin sidak.

Dijelaskan bahwa pembangunan terminal sudah berlangsung sejak 4-5 bulan yang lalu. Progres pengerjaan juga sudah sesuai dengan masa kerja yang ada.

"Kita lihat secara langsung bagaimana pembangunan terminal saat ini, dalam pembangunan berlangsung pun kami selalu memantau," bebernya.

Amir juga menambahkan, pihaknya mengkhawatirkan pengerjaan

proyek pembangunan terminal ini bakal meleset dari target. Jika meleset, lanjut Amir, maka pembangunan yang lain di Bontang juga akan sama.

"Maka ini kami akan estafetkan untuk peninjauan. Rencana Selasa kami akan melakukan sidak lagi di beberapa tempat untuk memantau semua infrastuktur yang dibangun di Bontang," tutupnya. (dwi/adv)

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari

Komisi III DPRD Bontang Pertanyakan Progres Pembangunan Terminal Baru 75 Persen

BONTANG - Rombongan Anggota Komisi III DPRD Bontang melakukan peninjauan di proyek Pembangunan Terminal yang beralamat di Jalan Letjen S Parman, Bontang Barat pada Senin (13/11/2023). Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, Amir Tosina.

Dalam peninjauan ini, Amir mempertanyakan progres proyek pembangunan terminal yang terbilang lambat. Padahal, proyek ini sudah berjalan sekitar 4-5 bulan dan ditargetkan Desember 2023 akan rampung.

Namun pada kenyataannya, proyek pembangunan terminal ini masih jauh dari target. "Kita sangat khawatir, dengan waktu yang sudah ditentukan akan tetapi pengerjaan belum selesai.

Masalah di kami, masyarakat pada mempertanyakan," paparnya.

Dari informasi yang masuk, banyaknya para pekerja yang mengeluhkan jauhnya jarak transportasi untuk mereka bekerja beberapa bulan terakhir. Komisi III DPRD Bontang tetap mendesak kontraktor untuk cepat menyelesaikan proyek pembangunan terminal.

"Bapak mempunyai kuasa, tolong kasih saya alasan kenapa bisa pengerjaan belum selesai jika tidak sesuai dengan target. Agar kami bisa memberi alasan kepada mereka," ungkapinya kepada pihak kontraktor.

Konsultan Pengawasan CV Arori Teknika, Muhammad Rusdi menjelaskan untuk pengerjaan pemban-

gunan terminal saat ini sudah memasuki 75 persen. Dalam perencanaan, November ini progresnya berjalan di angka 85 persen. Pihaknya menjamin pengerjaan akan rampung sebelum akhir Desember 2023.

"Kami maksimalkan penyelesaian secepat mungkin, untuk pembangunan terminal ini, dan akan dibangun tingkat dua lantai nantinya. Lantai bawah untuk penumpang masuk, dan sedangkan yang di atas untuk kantor," tutupnya. (dwi/adv).

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari



DWI

Rombongan Komisi III DPRD Bontang meninjau langsung pembangunan terminal.

DPRD Bontang Soroti Pekerja Proyek Terminal Tidak Dilengkapi APD

BONTANG - Saat para rombongan Komisi III DPRD Bontang melakukan peninjauan secara langsung proyek pembangunan terminal, ternyata ditemukan bahwa hampir seluruh pekerja proyek tidak dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD).

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengaku sangat terkejut saat melihat para pekerja yang tidak menggunakan pengaman atau APD untuk keselamatan diri dalam bekerja.

"Ini tidak boleh dibiarkan, karena ini sangat bahaya. Setidaknya para pekerja semuanya menggunakan APD untuk keamanan dan keselamatan dalam bekerja," paparnya saat diwawancarai, Senin (13/11/2023).

Konsultan Pengawasan CV Arori Teknika, Muhammad Rusdi Fadillah mengatakan dari pihaknya sudah mempersiapkan APD saat di lingkungan kerja. Akan tetapi para pekerja tidak mau menggunakannya. "Sebenarnya kami sudah mempersiapkan,

tetapi para pekerja yang tidak mau menggunakannya," ucapnya.

Oleh sebab itu, Amir mempertegas pada pengawas agar setelah ini menginstruksikan seluruh pekerja wajib menggunakan APD yang ada. Ini demi keselamatan dalam bekerja, karena keselamatan itu adalah yang paling utama. (dwi/adv)

Pewarta : Dwi

Editor : Nicha Ratnasari



SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE



Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 18 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 75 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@ibishotelsamarinda 0811 - 551 - 6000

all.accor.com



Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai

Penggabungan Berau ke Kaltara Sulit Dilakukan Secara Teknis

TANJUNG REDEB - Ajakan Berau untuk bergabung ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ditolak masyarakat. Termasuk Wakil Ketua II DPRD Berau, Ahmad Rifai.

Dia mengungkapkan, penggabungan Berau-Kaltara sulit dilakukan secara teknis. Meski, pada tahun 2003 silam Berau sebagai salah satu daerah yang diminta untuk memberikan pernyataan sikap terkait berdirinya Kaltara.

"Seingat saya, itu ada lima kabupaten. Yakni Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tarakan. Tetapi hanya Berau yang tidak menyepakati," ungkapnya.

Tidak sepakatnya Berau, berujung kepada tidak ikut bergabung dengan Kaltara atau tetap berada di Kaltim. Alasan tidak ingin bergabungnya Berau pada Provinsi Kaltara pada saat itu, dijelaskan Rifai, berdasarkan pertimbangan terkait sisi demografi, kemampuan anggaran serta keberadaan suku heterogen yang dimiliki Berau.

"Untuk mendirikan Provinsi Kaltara saat itu memerlukan waktu yang sangat panjang, tidak mudah melakukan penggabungan. Rencana pendirian Provinsi Kaltara sebelumnya telah dilakukan sejak 2003. Sama seperti saat ini, ketika Berau kembali diminta

bergabung, kalau pun Berau mau bergabung tidak mudah itu mengubah undang-undang yang telah ada," jelasnya.

Rifai meminta masyarakat tidak mudah terpancing isu-isu yang berkaitan dengan penggabungan Berau-Kaltara, karena ditegaskannya bahwa Berau tidak akan semudah itu untuk berpindah dari sisi Kaltim.

"Selama 20 tahun ajakan ini terus kita terima, tapi tidak pernah terealisasi. Karena memang tak gampang itu, baik secara teknis maupun secara non teknis yang diputuskan masyarakat Berau," pungkaskannya. (adv/dez)

Kekosongan Jabatan di OPD Harus Segera Terisi

TANJUNG REDEB - Saat ini, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kekosongan jabatan Kepala Dinas. Hal itu disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

Dia membeberkan, OPD yang kekosongan Kepala Dinas yakni Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). "Saya harap BK-PSDM bisa segera melakukan lelang untuk posisi jabatan tersebut, sehingga kekosongan tidak terjadi terlanjur lama," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, dalam proses pengisian jabatan, yang terpenting adalah profesionalisme terhadap calon-calon pengisi jabatan fungsional. "Kenapa harus profesionalisme? Agar dalam menjalankan tugasnya dapat lebih maksimal. Saya harap proses lelangnya bisa lebih cepat," tegasnya.

Kendati demikian, pengisian jabatan dengan orang yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan instansi terkait. Sehingga, latar belakang pendidikan serta pengalaman karir yang dimiliki harus benar-benar sesuai dengan posisi jabatan tersebut.

"Misalnya posisi Kepala Dinas Kesehatan, kami berharap nantinya benar-benar diisi oleh orang yang tepat dan sesuai, sehingga program kerja kesehatan bisa langsung diterima dan berjalan dengan baik dan maksimal," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo

Rekomendasi KPK, Dorong Penyelesaian Gedung Baru Disbudpar

TANJUNG REDEB - Pembangunan gedung baru Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) terus berprogres. Akan tetapi, penyelesaiannya diharapkan Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman dipercepat.

Dia menjelaskan, alasan dirinya mendorong penyelesaian pembangunan gedung baru Disbudpar tersebut berdasarkan arahan KPK.

"Arahannya itu untuk menyelesaikan seluruh progres pembangunan yang masih berjalan. Maka dari itu, kami terus dorong untuk segera diselesaikan," ungkapnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, harus ada keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dalam mengawasi kegiatan proyek pembangunan.

"Yang penting jangan sampai mangkrak. Paling tidak, ada progres yang terus berjalan," katanya.

Sakirman membeberkan, untuk penyelesaian pembangunan gedung tersebut telah dianggarkan pada tahun 2024 mendatang. Untuk itu, pihaknya terus mendorong progresnya hingga rampung dikerjakan.

"Gedung pariwisata sekarang sudah berjalan dan tahun depan mudah-mudahan bisa selesai gedung pariwisata kita itu," pungkasnya. (adv/dez)



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

Seiring Perkembangan Rumah Sakit, Dorong Peningkatan Kualitas Tenaga Medis



Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna

TANJUNG REDEB - Kesehatan masyarakat menjadi indikator yang sangat penting terhadap suatu daerah. Sehingga, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan kualitas tenaga medis yang mumpuni.

Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna menuturkan, peningkatan kualitas tenaga medis harus merata. Baik itu yang bertugas di Puskesmas maupun rumah sakit.

"Pemerintah harus segera menyusun skema pelayanan dokter kepada pasien, dengan cara memberikan beasiswa kepada dokter muda agar naik kelas ke spesialis dan bisa mengabdikan ilmu yang diperoleh di Kabupaten Berau," ungkapnya.

Lanjutnya, tidak jarang pasien berobat di rumah sakit mengeluhkan kurangnya pelayanan. Hal ini yang harus diperhatikan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

"Pada hari sabtu atau minggu pelayanan sudah tutup. Belum lagi pasien yang harus dirujuk keluar daerah agar dapat layanan intensif," terangnya.

Politikus Golkar itu berharap, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada pengembangan rumah sakit saja, melainkan juga turut memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM).

"SDM ini juga sangat penting, percuma kita punya perlengkapan yang mumpuni tapi tidak didukung oleh SDM yang berkualitas," tandasnya. (adv/dez)

Minta Pemerintah Fasilitasi Perizinan UMKM

TANJUNG REDEB - Perizinan produk UMKM lokal menjadi suatu hal yang penting, agar dapat dipasarkan dengan jangkauan yang lebih luas. Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengungkapkan, agar para pelaku UMKM dapat dengan mudah mengantongi legalitas, diperlukan dukungan dari pemerintah daerah.

"Ini sangat disayangkan, jika masih banyak UMKM kita yang terkendala izin. Padahal, produk lokal kita terus menunjukkan tren positif," ungkapnya kepada media ini.

Ia menyebut, salah satu kendala yang banyak ditemui di lapangan adalah, produk kuliner yang belum mendapat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dari Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM). "Banyak UMKM lokal kita yang mengurus izin-izannya masih keteteran. Karena urusan izin PIRT BPOM itu kan agak susah," bebarnya.

Dikatakannya, perizinan itu perlu diperoleh agar produk yang dihasilkan dapat go public. Makanya, para pelaku UMKM harus didampingi dan dibina. Agar produk yang dihasilkan dapat dipasarkan secara luas baik di dalam maupun luar negeri. "Kami ingin pelaku UMKM di Berau perkembangannya signifikan, sampai mereka bisa mandiri dan produk diterima pasaran," tandasnya. (adv/dez)



Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah



GK Grand Kartika
HOTEL

COOL NOVEMBER

Deluxe Room Only

Rp 488rb

nett/night

GRATIS WELCOME VOUCHER

Breakfast
2 pax



FREE

Laundry
Up To 2 pcs



FREE

Kopi Inspirasi
Buy 3, Pay 2



FREE

**Afternoon
Tea**



FREE

Ice Cream



→ BOOK NOW

0811 581 3669

www.hotelgrandkartika.com



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Penyerahan hadiah pembinaan untuk juara-juara Badminton Turnamen 2023 RSUD.

Tim IGD A Rebut Juara I Badminton Turnamen 2023 HUT ke-21 RSUD Bontang

BONTANG – Badminton Turnamen 2023 dalam rangka HUT ke-21 RSUD Taman Husada Bontang dimenangkan tim dari Instalasi Gawat Darurat (IGD) A pada pertandingan final, Jumat (10/11/2023), di lapangan badminton Amariq Bontang.

Ketua Pelaksana Badminton Turnamen 2023 RSUD Bontang, Muhammad Junaid mengatakan pelaksanaan Badminton Turnamen 2023 telah menghasilkan Juara 1 untuk Tim IGD A yang telah mengalahkan tim kamar operasi dengan skor 2-0 secara langsung.

“Finalnya masuk tim IGD A melawan tim Kamar Operasi dan dimenangkan ganda putra dan ganda putri,” jelasnya kepada Mediakaltim.com, Minggu (12/11/2023).

Junaid mengatakan pelaksanaan Badminton Turnamen 2023 dalam rangka HUT ke-21 telah dilaksanakan sejak babak penyisihan hingga pertandingan final yang diikuti 20 tim yang terbagi dalam 5 grup. “Kita telah mulai pada 29 Oktober hingga 5 November 2023 hingga pertandingan final di 10 November 2023,” ungkapnya.

Melalui pelaksanaan Badminton Turnamen 2023, Ia mengharapkan ada tim-tim yang dapat menghasilkan pemain badminton. “Finalnya menghasilkan pemenang Tim IGD A, Juara 2 Kamar Operasi, Juara 3 dimenangkan bersama oleh Laboratorium bersama Farmasi dan Juara Harapan oleh Tim Keuangan A dan Tim IGD B,” pungkash Junaid. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Alat CT Scan 128 Slice yang dimiliki RSUD Taman Husada Bontang.

Punya CT Scan 128 Slice, RSUD Bontang Siap Terima Pasien dari Luar

BONTANG – RSUD Bontang memiliki CT Scan 128 Slince yang dapat lebih unggul dibandingkan dengan penggunaan CT Scan biasa. Hal ini diungkapkan Kepala Instalasi Radiologi RSUD Taman Husada Bontang, dr Agustiana, Sp. Rad, M.Kes.

“CT Scan ini digunakan untuk melihat organ dalam seperti organ otak sampai untuk ke organ jantung yang paling unggul digunakan,” kata dr Agustiana, Sp. Rad, M.Kes kepada mediakaltim.com kala ditemui.

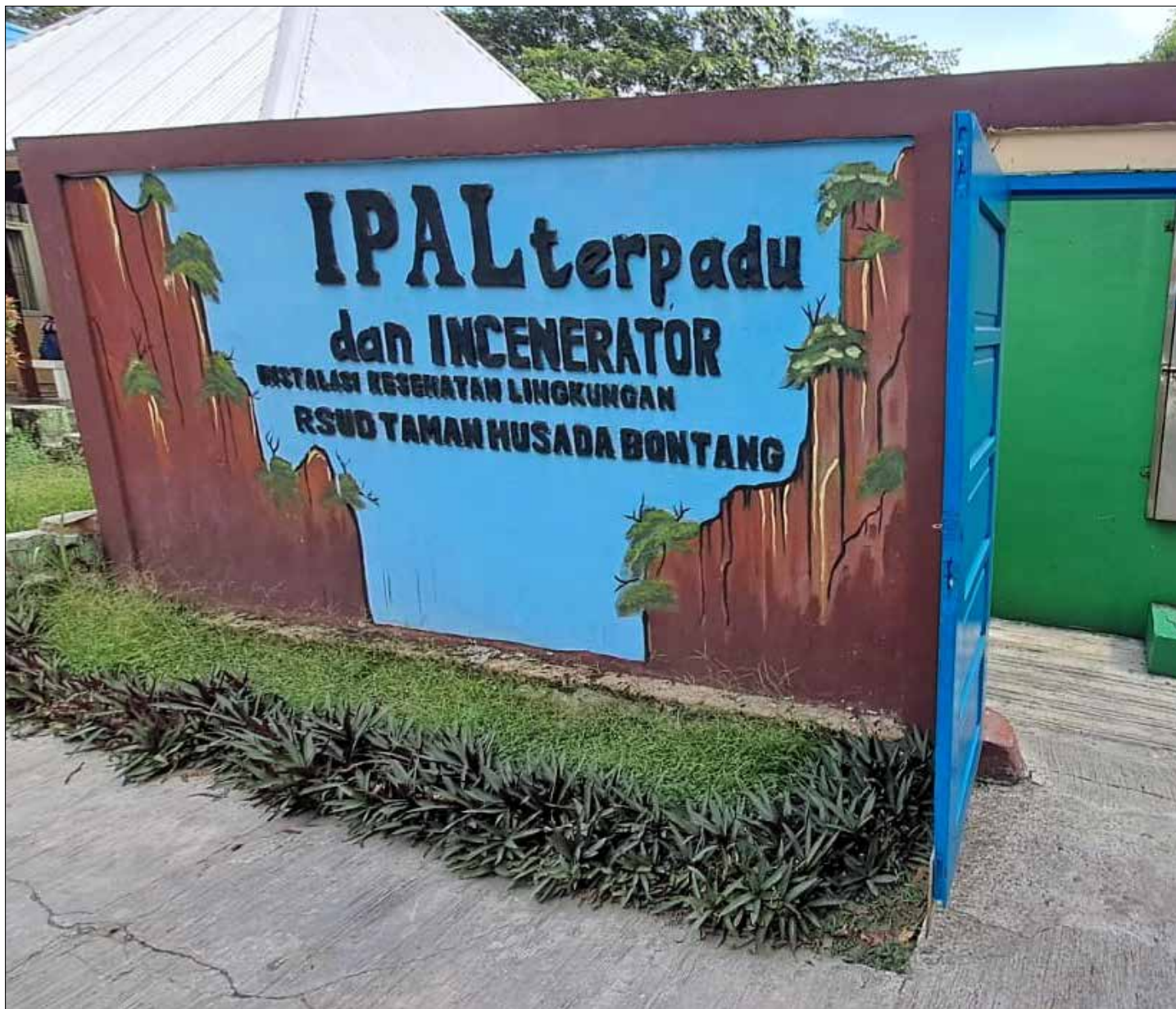
Ia mengatakan CT Scan sendiri memiliki banyak macam seperti CT

Scan 2 Slice, 64 Slice dan 128 Slice. “Instalasi radiologi mendapat kiriman dari dokter-dokter klinis untuk dilakukan pemeriksaan radiologi untuk penunjang pemeriksaan diagnosa,” kata dr Agustiana.

Ia mengatakan, instalasi radiologi memiliki berbagai macam alat-alat radiologi baik yang konvensional maupun alat-alat yang lebih canggih. “Alat-alat canggih seperti alat USG, CT Scan. Radiologi juga memeriksakan dengan menggunakan media kontras hingga pemeriksaan HSG,” katanya.

Dr Agustiana mengatakan untuk pasien-pasien yang datang ke radiologi sebelumnya telah dilakukan rujukan ke instalasi radiologi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. “Kami terimarujukan dari dokter-dokter poli klinik. Kalau dari luar RSUD Bontang kami terima pengantar dari dokter pengirim karena kita mau tahu diagnosanya,” jelanya. **(adv/yah)**

*Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari*



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Incenerator yang dimiliki RSUD Taman Husada Bontang.

Limbah B3 RSUD Bontang Dimusnahkan dengan Incinerator

BONTANG – RSUD Taman Husada Kota Bontang menangani limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) atau limbah medis dengan cara dibakar menggunakan alat incinerator.

Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan (Kesling) RSUD Taman Husada Bontang, Sri Erna Nilawati mengatakan sampah-sampah medis atau limbah medis yang telah digunakan atau sisa penggunaan akan dimusnahkan dengan cara dibakar menggunakan incinerator dengan suhu 800 derajat celsius hingga 1.200 derajat celsius untuk pemba-

karan asap sisa pembakaran limbah medis.

Ia mengatakan saat ini RSUD Bontang masih menggunakan incinerator dengan kapasitas 80 kilogram setiap pemusnahan limbah medis.

“Setiap dari klinik atau ruangan sudah dipisahkan antara sampah medis dan sampah non medis. Limbah medis akan dimusnahkan atau dibakar di incinerator milik RSUD Bontang,” kata Sri Erna Nilawati kepada Mediakaltim.com, Senin (13/11/2023).

Ia mengatakan incinerator RSUD

Bontang telah ada sejak RSUD Bontang berdiri dan telah direnovasi hingga tiga kali.

“Kalau limbah medis alternatifnya ya di insinerasi atau dilakukan pembakaran. Kalau hasil pembakaran (abu) sisanya kita kirim ke PT PPLI setahun sekali sebagai yang mengelola jasa pembuangan limbah,” katanya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo

Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Proses pengerjaan incenerator baru milik RSUD Bontang di instalasi kesehatan lingkungan.

RSUD Bontang Akan Miliki Incinerator Baru Berkapasitas 200 Kg untuk Limbah Medis

BONTANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) akan memiliki incinerator baru dengan kapasitas 200 kilogram. Ini juga menjadi alat baru yang akan dimiliki RSUD Bontang dalam hal pemusnahan limbah B3 atau limbah medis.

Kepala Instalasi Kesehatan Lingkungan RSUD Taman Husada Bontang, Sri Erna Nilawati mengatakan tahun ini RSUD Bontang men-

gadakan alat incinerator baru dengan kapasitas yang lebih besar.

"Ini sudah 80 persen kalau mesin incineratornya. Tinggal pembangunan fisik untuk bangunan tempat incineratornya yang sudah mencapai 75 persen," kata Erna kepada Media advkaltim.com saat ditemui.

Selanjutnya, Ia mengatakan proses penyelesaian akan ditargetkan selesai pada Desember 2023. Selain itu,

setelah proses selesai, incinerator harus memiliki izin sebelum digunakan untuk pembakaran limbah medis.

"Setelah selesai menunggu lagi, harus ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)," ungkapnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Proses pelatihan BTCSL yang dilaksanakan RSUD Taman Husada Bontang.

Perawat dan Bidan RSUD Bontang Ikuti Pelatihan BTCLS di Samarinda

BONTANG – Tingkatkan keilmuan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi perawat hingga bidan, RSUD Taman Husada melaksanakan pelatihan Basic Trauma and Cardiac Live Support (BTCLS) yang dilaksanakan pada 8 - 11 November 2023 bertempat di Hotel Horison, Samarinda.

Sub Koordinator Penunjang Keperawatan RSUD Taman Husada Bontang, Bambang Sri Mulyono menjelaskan BTCLS wajib diikuti perawat dan bidan untuk pelatihan dasar BTCLS. Ia mengatakan pelatihan dilaksanakan secara langsung dalam rangkaian studi orientasi ke

RSUD AWS Samarinda.

“Salah satu rangkaian dalam kunjungan ke RSUD AWS Samarinda setelah melihat tata kelola UGD. Perawat wajib mengikuti pelatihan BTCLS bersama Hippgabi Kaltim,” jelasnya kepada Mediakaltim.com saat ditemui.

Bambang mengatakan pelatihan yang dilaksanakan bagi perawat dan bidan dimaksudkan untuk mendapatkan sertifikat dan memenuhi kapasitas peningkatan SDM.

“Output-nya sertifikat kelulusan dan pemenuhan kapasitas peningkatan sumber daya manusia. Hasil-

nya kami ingin lulus 100 persen dan memiliki sertifikat pelatihan BTCSL,” terangnya.

Ia pun menambahkan semua pelatihan dimaksudkan dalam memenuhi visi misi rumah sakit yakni sebagai rumah sakit terbaik di Kalimantan Timur dan berstandar internasional. “Tujuan kami yakni mengejar capaian visi misi rumah sakit dalam menjadi rumah sakit terbaik di Kaltim,” sebutnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



YAHYA YABO/MEDIA KALTIM

Pelatihan ENIL yang diikuti 30 perawat dan bidan RSUD Bontang.

Tingkatkan SDM, RSUD Bontang Gelar Pelatihan ENIL bagi Perawat dan Bidan

BONTANG – RSUD Taman Husada bersama Hipgabi mengadakan pelatihan perawat dan bidan dalam bidang 'Emergency Nursing Intermediate' Level (ENIL) yang dilaksanakan pada 13 - 19 November 2023 bertempat di lantai 4 gedung B RSUD Bontang secara online (daring) dan tatap muka di Samarinda.

Sub Koordinator Penunjang Keperawatan, Bambang Sri Mulyono mengatakan kegiatan pelatihan ENIL diperuntukkan bagi perawat dan bidan di RSUD Taman Husada Bontang. Ia mengatakan kegiatan pelatihan berlangsung secara online (daring) dan akan dilaksanakan tatap muka di Samarinda dalam hal tes setelah mendapatkan pelatihan.

"Ini kegiatan rutin yang dilaksanakan di bidang keperawatan yakni pelatihan ENIL. Ini merupakan pelatihan tingkat lanjutan," kata Bambang kepada *Mediakaltim.com*, Senin (13/11/2023).

Bambang mengatakan ada sebanyak 30 perawat dan bidan yang berasal dari semua unit termasuk unit Instalasi Gawat Darurat (IGD). "Sebagian besar peserta dari IGD dan dari ruangan-ruangan perawat yang menangani jantung," ungkapnya.

Selain itu, ia pun mengatakan pelatihan digabungkan dengan daring dan luring. Untuk pelatihan tatap muka sendiri akan dilaksanakan di Samarinda. "Ini pertama dilaksanakan dengan jumlah 30 peserta

dalam satu rumah sakit bersama Hipgabi Kaltim bersama Hipgabi Pusat," terangnya.

Bambang mengatakan tujuan dilaksanakan pelatihan pun sebagai bagian dari mewujudkan visi misi RSUD Taman Husada Bontang dengan menjadi rumah sakit terbaik di Kalimantan Timur berstandar internasional.

"Akan ada ujiannya juga bagi peserta pelatihan. Tujuannya sebagai bagian dari visi dan misi rumah sakit. Meningkatkan pelayanan paripurna dan meningkatkan SDM RSUD Bontang," pungkasnya. (adv/yah)

Penulis: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Bigun Karama No. 116A, Sebelah Kiri, Bontang Barat, Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

TOYOTA LET'S GO BEYOND

BOOKING THS SAJA

BTS
di Digiroom

THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*

Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo
BTSOLI

*Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Sekdakot Balikpapan, Muhaimin lepas kontingan atlet NPC Kota Balikpapan, Senin (13/11).

Sekda Balikpapan Lepas 170 Atlet NPC Balikpapan, Siap Berlaga di Peparprov 2023

BALIKPAPAN - Sebanyak 170 atlet, pelatih dan official National Paralympic Committee (NPC) Kota Balikpapan siap untuk untuk berlaga dalam Pekan Paralympic ke-4 tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai 15-20 November 2023 dalam 13 cabang olah raga.

Pertandingan yang akan berlangsung di Balikpapan ini, menggunakan beberapa venue. Di antaranya, Dome, Tennis Indoor Balikpapan, Lapangan Sudirman, Kolam Renang Mulawarman, dan Hevindo.

Pelepasan atlet NPC tersebut dilakukan Sekdakot Balikpapan, Muhaimin mewakili Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud dan didampingi Staf Ahli, Heria Prisni, Kepala DPOP Balikpapan, Ratih Kusuma, Ketua National Paralympic Committee Indonesia (NPCi) Kaltim dan NPCi Balikpapan, di Halaman Pemkot Balikpapan, Senin (13/11/2023).

Muhaimin meminta kontingen

atlet paralympic Balikpapan untuk tampil dengan semangat mencapai prestasi walaupun dalam kondisi terbatas. "Jumlah besar harus ditebus dengan prestasi yang besar pula. Jadilah juara tapi bukan menghalalkan segala cara," ujarnya.

Lebih lanjut Muhaimin menjelaskan, meski memiliki keterbatasan namun tidak menutup untuk para atlet ini berprestasi, bahkan hingga ajang nasional.

"Ada keterbatasan tapi tidak menutup untuk berprestasi mengalahkan yang normal. Tekad kita jadi yang terbaik di Kaltim, tapi dengan cara sportivitas," jelasnya.

Sementara itu, Ketua NPCi Kaltim, Suharyanto mengatakan, ada sekitar 913 orang yang terlibat dalam gelaran Peparprov 2023 di Balikpapan, yakni 615 atlet paralympic, 256 wasit dan juri serta 200 pelatih. Kegiatan Peparprov Kaltim 2023 juga di dukung panitia sekitar 200

orang. "Cabor itu 15 tapi masih nunggu dua cabor bowling dan an-ggar," tambahnya.

Ke depannya, Peparprov ini akan menjadi seleksi Peparnas 2024. Di mana nantinya akan ada training center (TC) dari masing-masing Kabupaten/Kota. "Nah, dari sini Peparprov betul-betul diambil untuk Peparnas tahun depan di Medan. Kalau anggaran kita dapat dari D-Bon sekitar 5 miliar," jelasnya.

Di tempat yang sama Kepala DPOP Balikpapan, Ratih Kusuma menambahkan untuk atlet paralympic dan kontingen Balikpapan berjumlah 174 atlet. "Atlet berjumlah 141 atlet dan 31 pelatih. Secara keseluruhan ada 658 atlet Balikpapan ikut semua 13 cabor. Diikuti 9 kabupaten/kota," ujarnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



Kanit Jatanras Polresta Balikpapan, Ipda Wempy Ardentia menunjukkan pelaku dan barang bukti kejahatan.

Jual Sepeda Motor Curian di FB, Pemuda di Balikpapan Ditangkap Polisi

BALIKPAPAN - Unit Jatanras Polresta Balikpapan menangkap seorang pemuda berinisial IF (25) warga Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara karena telah menawarkan dan menjual sebuah sepeda motor hasil curiannya kepada korbannya sendiri.

Kanit Jatanras Polresta Balikpapan, Ipda Wempy Ardentia mengatakan, pelaku ditangkap di kawasan Kelurahan Batu Ampar, Balikpapan Utara pada Rabu (8/11/2023) lalu. Saat itu dirinya yang sudah janji dengan calon pembeli bertemu di suatu tempat.

"Jadi korban liat postingan di FB, jika motor yang dijual ini adalah motornya yang hilang pada 23 Oktober lalu. Kemudian janji untuk melihat motor yang dimaksud, dan korban juga menghubungi kita," ujarnya,

Senin (13/11/2023).

Lebih lanjut Wempy menjelaskan, setelah dipastikan benar pelaku bersama sepeda motor milik korban yakni Honda Scoopy berwarna hitam dengan nopol KT 6477 YL, petugas pun langsung menangkapnya.

"Saat dilakukan penangkapan pelaku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan mengakui perbuatannya," jelasnya.

Pelaku dan barang bukti pun langsung di bawa ke Makopolresta Balikpapan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Diketahui modus pelaku saat mengambil sepeda motor tersebut, karena masih tertempelnya kunci di sepeda motor tersebut. Dan pelaku pun mendorongnya lebih dulu sebelum membawanya kabur.

"Jadi dia liat kuncinya masih nempel. Dan dia bawa dengan menjorongnya lebih dulu kemudian dinyalakan agar orang di sekitarnya tidak tahu," tambah Wempy.

Untuk itu Wempy juga mengimbau masyarakat, agar lebih teliti dan waspada terhadap kendaraan yang diparkirkan atau ditaruh di manapun. Ia meminta, agar memastikan kuncinya tercabut serta kendaraan yang dimiliki terkunci dengan baik.

"Atas perbuatannya kita sangkan Pasal 363 KUH Pidana, dengan ancaman kurungan penjara 7 tahun," tutup Wempy.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



RAFI'I/MEDIA KALTIM

Puluhan atlet dari Kontingen NPCI Kukar yang dilepas untuk berlaga di Peparprov IV Kaltim di Balikpapan.

105 Atlet NPCI Dilepas Pemkab Kukar ke Peparprov IV Kaltim

TENGGARONG - Sebanyak 105 atlet yang tergabung dalam Kontingen National Paralympic Committee of Indonesia (NPCI) Kutai Kartanegara (Kukar), dilepas oleh Pelaksana Tugas (Plt) Asisten III Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dafip Haryanto.

Mereka akan berlaga di Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) IV Kalimantan Timur (Kaltim) di Balikpapan, pada tanggal 15-20 November 2023.

Dafip melanjutkan, Pemkab Kukar sangat optimis bahwa atlet yang dikirim bisa memberikan hasil yang terbaik. Terlebih sudah menjalani rangkaian pertandingan tingkat daerah, yang digelar belum lama ini. Di mana atlet asal Kukar juga berbicara banyak.

"Harapannya prestasi sebelumnya jadi pelecut semangat para atlet," ungkap Dafip, Senin (13/11/2023).

Dafip melanjutkan, dengan event tingkat Kaltim yang dilakukan selama sepekan di Balikpapan ini, Kontingen Kukar bisa berbicara banyak. Meskipun lawan yang dihadapi tingkat level yang semakin meningkat, namun ia berpesan bisa memberikan perlawanan untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi.

"Siapkan mental dan semangat pantang menyerah dan jadi kebang-

gaan Kukar yang kita cintai. Kepada pimpinan kontingen dan pelatih, ofisial, dan atlet saya pesan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," tutupnya.

Sementara itu, Kabid Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda Olahraga (Dispora) Kukar, Zukran, 105 atlet yang akan mewakili Kukar di Peparprov IV Kaltim di Balikpapan, merupakan atlet-atlet terbaik Kukar hasil Pekan Special Olympic Daerah (Pesoda) 1 Kaltim di Kukar belum lama ini.

Selain itu juga melakukan pembinaan secara kontinyu oleh Dispora Kukar melalui NPCI Kukar. Sehingga atlet terus difasilitasi, memastikan proses pembinaan terus berjalan.

"Kami harap kawan-kawan yang berlaga dapat memberikan yang ter-

baik untuk Kontingen Kukar," ucap Zukran.

Zukran pun berharap, seluruh atlet yang bertanding bisa memberikan hasil maksimal dan para atlet bisa berjuang memberikan yang terbaik. Sehingga tidak hanya berprestasi di tingkat daerah saja, namun juga bisa memberikan prestasi di tingkat nasional hingga internasional.

"Mudahankita diberikan hasil yang terbaik," pungkas Zukran.

Diketahui, total 10 cabang olahraga (cabor) yang akan diikuti oleh Kontingen NPCI Kukar. Yakni Angkat Berat, Bocchia, Panahan, Renang, Catur, Bulutangkis, Menembak, Atletik, Tenis Meja dan Voli Duduk.

*Penulis: Muhammad Rafi'i
Editor: Nicha Ratnasari*





Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Diharapkan Responsif Kebutuhan Masyarakat

MAHAKAM ULU - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mahakam Ulu menggelar kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) pada Bidang Tata Lingkungan DLH Mahulu di ruang rapat Bappelitbangda, Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Senin (13/11/2023).

KLHS digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi kebijakan, rencana atau program yang akan atau sudah ditetapkan, sebagai instrumen untuk menerapkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mahulu tahun 2025-2045. Selain itu, ini juga sebagai acuan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan pembangunan.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dodit Agus Riyono, saat membacakan sambutan tertulis Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh mengatakan bahwa KLHS merupakan komponen yang tak terpisahkan dari perjalanan pembangunan nasional.

Diharapkan pada kebutuhan akan perencanaan yang matang dan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi dinamika perkembangan global, nasional, dan lokal, Pemkab Mahulu merasa penting untuk merumuskan RPJPD yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

"Saya berharap kepada seluruh peserta agar terlibat secara aktif dalam meningkatkan kualitas kajian lingkungan hidup strategis. Berikan masukan, saran, dan pandangan yang mendalam terkait dampak potensial pembangunan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Ajukan pertanyaan yang kritis dan konstruktif guna memastikan bahwa kajian ini mencapai berbagai perspektif dan mempertimbangkan keragaman kepentingan masyarakat," jelasnya.

Dengan adanya kontribusi aktif dari seluruh peserta, diharapkan dokumen KLHS yang dihasilkan dapat mencerminkan aspirasi masyarakat, meminimalkan dampak negatif, dan mendorong perencanaan pembangunan yang berkelanjutan untuk Kabupaten Mahulu pada periode 2025-2045, sebagai panduan pemba-

ngunan yang lebih baik dan berdaya tahan," pungkasnya.

Dalam laporannya, Sekretaris DLH Irawan Sanjaya, mengatakan bahwa instruksi terkait dengan penyusunan RPJMD ini sudah sejak bulan Juli tahun 2022 lalu ditegaskan oleh Kemendagri. Untuk semua provinsi dan semua kabupaten/kota harus segera melakukan persiapan penyusunan RPJMD baik provinsi maupun kabupaten/kota memang sedikit agak terlambat dalam hal penganggaran sehingga muncul pada perubahan APBD tahun anggaran 2023.

"RPJPD ini satu-satunya dan pertama kali disusun sejak Mahakam Ulu berdiri. Jadi selama ini kita baru menyusun RPJPD, kemudian RPJPD 2021-2023 ada revisi review RPJPD melalui perubahan dan itu juga sudah terlaksana sebelumnya. RPJPD ini disusun oleh Pemkab Mahulu dengan ketentuan 20 tahun secara aturan. Makanya kita susun RPJPD ini dan KLHS tahun 2025-2045," kata Sekretaris DLH Mahulu Irawan Sanjaya.

Pewartu : Ichal

Editor : Nicha Ratnasari

Diikuti 10 Kecamatan, Bupati Resmikan Porkab Paser 2023

PASER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser menggelar Pekan Olahraga Kabupaten (Porkab) ke-XVII Paser 2023, diikuti oleh 10 Kecamatan se-Kabupaten Paser yang secara resmi terlaksana di Halaman Kantor Bupati Paser, sejak Senin (13/11/2023).

Bupati Fahmi Fadli menyampaikan, Porkab ke-XVII merupakan momentum yang sangat penting bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Paser. Utamanya bagi para pencinta dan pemerhati olahraga di Paser.

"Karena Porkab ini selain untuk menunjukkan kemampuan, keterampilan dan bakat dalam berolahraga namun juga sebagai ajang pembinaan atlet Paser," kata Fahmi.

Pada Porkab ini, sebanyak 1.868 atlet dari setiap kecamatan terlibat. Pemkab Paser menurutnya, akan menjangkau atlet-atlet profesional un-

tuk Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kaltim pada 2026 di Kabupaten Paser lewat Porkab ini.

"Porkab jadi persiapan atlet sebelum Porprov Kaltim pada 2026, karena Kabupaten Paser menjadi tuan rumah," ujar Fahmi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser, Arief Rahman mengatakan, kegiatan Porkab kali ini terselenggara setelah 11 tahun tidak pernah digelar.

"Terakhir terlaksana pada 2012. Setelah sebelas tahun porkab ini bisa diselenggarakan," ucapnya.

Adapun total yang terlibat mencapai 2.293 orang. Di antaranya, terdiri dari 1.868 orang atlet, 199 pelatih dan 226 ofisial. Sementara ada 14 cabang olahraga (Cabor) dipertandingkan dalam porkab itu.

Cabor tersebut terdiri dari 13

cabang wajib seperti atletik, bola voli, bulu tangkis, dayung, pencak silat, sepakbola, tenis meja, basket, futsal, catur, pickleball, renang, karate, dan sepatu roda sebagai cabor eksibisi.

"Ada empat cabang yang dipertandingkan sebelum pembukaan, yaitu sepakbola, futsal, bulu tangkis, dan dayung," katanya.

Terdapat pula tiga olahraga masyarakat yang dipertandingkan, yaitu senam kreasi, balogo, dan layang-layang khas. "Jenis olahraga itu tidak masuk dalam kriteria perhitungan perolehan medali, tapi menjadi ajang kompetisi kreasi dengan penilaian tersendiri," katanya.

Pewarta : Bhakti Sihombing

Editor : Nicha Ratnasari

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PILING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

Drusen Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Sesi foto bersama di sela kegiatan Diskusi Kebudayaan dengan tema Inspirasi, Eksplorasi, dan Visualisasi Konten Kebudayaan. Acara ini diadakan di Ballroom Hotel Aston Samarinda.

Hetifah: Kebudayaan Butuh Panggung untuk Berekspresi yang Bertoleransi

SAMARINDA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr Hetifah Sjaifudiana MPP bekerja sama dengan Balai Media Kebudayaan (BMK) Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kemendikbudristek RI, mengadakan acara Diskusi Kebudayaan dengan tema Inspirasi, Eksplorasi, dan Visualisasi Konten Kebudayaan. Acara ini diadakan di Ballroom Hotel Aston Samarinda pada Senin (13/11/2023).

Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim, seperti Disdikbud Kaltim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan

Pariwisata (Kadisporapar) Samarinda, Muslimin, serta para pelajar dan mahasiswa.

Hetifah menyampaikan bahwa penting bagi kita untuk tidak hanya menjamin ketersediaan panggung untuk berekspresi, tetapi yang lebih penting adalah panggung interaksi yang bertoleransi. Karena inti dari kebudayaan adalah kegembiraan.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan Diskusi Kebudayaan dengan tema Inspirasi, Eksplorasi, dan Visualisasi Konten Kebudayaan," ujarnya.

Dalam sambutannya, Kepala BMK Kemendikbudristek, Retno Raswaty, menyambut baik kegiatan Diskusi Kebudayaan dengan tema In-

spirasi, Eksplorasi, dan Visualisasi Konten Kebudayaan. Menurutnya, hal ini sangat penting untuk sering diadakan sebagai wadah mengekspresikan diri.

Di sela-sela sambutannya, Retno juga memperkenalkan platform media milik BMK Kemendikbudristek yaitu kanal Indonesiana TV. Platform ini merupakan wadah untuk menyebarkan konten-konten budaya lokal seluruh Indonesia yang dimiliki oleh Balai Media Kebudayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan Kemendikbudristek RI.

Penulis : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



MERCURE

HOTELS

SAMARINDA



KARNAVALL Batik Nusantara

Rayakan warisan budaya Batik bersama
ALL - Accor Live Limitless di Indonesia.

Nikmati sarapan gratis dan dapatkan
harga khusus serta pengalaman berbeda

Pesan & menginap hingga 31 Desember 2023.

Book, stay, enjoy
THAT'S ALL.COM